

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan secara kualitatif dalam penelitian mengenai strategi LKM BMT Trans Ngudi Makmur dalam pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal di Desa Karangsewu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari sejarah berdirinya, LKM BMT Trans Ngudi Makmur merupakan satu-satunya lembaga ekonomi yang ada di kawasan transmigrasi lokal Ring 1 Karangsewu. Modal awal berdirinya LKM BMT Trans Ngudi Makmur diperoleh dengan dana swadaya masyarakat transmigrasi lokal yang dalam tahapan proses pendirian dilakukan dengan konsep *bottom-up*. Pendirian melalui konsep *bottom-up* yang dimaksudkan adalah pelibatan masyarakat transmigrasi lokal tersebut dimulai dari pendiriannya, pengurusnya, pengelolanya, penggalangan dana modal awal, pengawasannya dan hanya dalam legalitas kelembagaannya yang melibatkan Instansi Dinas untuk memperoleh ijin dengan tetap masyarakat transmigrasi lokal itu sebagai peran utama.
2. Dari hasil wawancara dengan *internal* LKM BMT Trans Ngudi Makmur dapat diketahui bahwa implementasi strategi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal adalah Refleksi Kemiskinan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemberdayaan Aset Keuangan dan Pemberdayaan Aset Sosial. Implementasi strategi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal secara keseluruhan telah dilakukan dan membawa manfaat untuk masyarakat

transmigrasi lokal di kawasan transmigrasi lokal ring 1 Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Dalam implementasi strategi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal, setelah dilakukan penelitian dan analisis data, maka hakikat pencapaian keberdayaan masyarakat transmigrasi lokal adalah pembelajaran bagi masyarakat.

3. Elemen utama dari pemberdayaan adalah sumber daya manusia yang berasal dari lingkungan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Rangkaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari refleksi kemiskinan, pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan aset keuangan dan pemberdayaan aset sosial telah dijalankan dengan baik, dengan memfokuskan pemberdayaan pada softskill melalui penyadaran akan keadaan mereka dan barulah kemudian melakukan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui beberapa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan praktis masyarakat transmigrasi lokal.
4. Evaluasi pencapaian pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui kajian evaluatif terhadap proses maupun hasilnya. Temuan evaluatif terhadap proses pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal di Ring-1 Karangsewu menunjukkan bahwa proses yang dilakukan telah sesuai dengan menggunakan konsep *bottom-up* untuk selalu mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya dan juga telah sesuai dengan kajian teori mengenai pemberdayaan masyarakat. Sedangkan temuan evaluatif terhadap hasil menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang berlangsung sejak LKM BMT Trans Ngudi Makmur berdiri telah melakukan implementasi

kegiatan yang bersifat sosial dan ekonomi. Temuan evaluatif dalam hasil mampu mengubah tingkat kesadaran masyarakat dan meningkatkan pemahamannya untuk turut serta berperan dalam kegiatan pembangunan di kawasan transmigrasi lokal, namun untuk mencapai tingkat kemandirian dan derajat keberdayaan yang sesungguhnya masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut yang harus dilakukan secara kontinyu dan terpadu.

B. Saran

1. Untuk menambah adanya partisipasi aktif dari masyarakat transmigrasi lokal dan memperbesar pemanfaatan LKM BMT Trans Ngudi Makmur oleh masyarakat di kawasan transmigrasi lokal perlu adanya sosialisasi yang secara intensif mengenai jasa pelayanan dan progam pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan penilaian terhadap LKM BMT Trans Ngudi Makmur menjadi lebih baik, mengingat pada akhirnya memperbesar peluang dalam pemanfaatan dan partisipasi aktif masyarakat transmigrasi lokal kepada LKM BMT Trans Ngudi Makmur.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan sehingga untuk memenuhi proses keberlanjutan suatu pemberdayaan sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal pelaksanaan program, evaluasi periodik setelah pelaksanaan program, untuk itu diperlukan perbaikan dalam hal administratif dokumen kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Masyarakat selaku pelaksana program pemberdayaan belum sepenuhnya mempunyai keberdayaan dan tingkat kemandirian yang cukup untuk mengelola pembangunan dalam pemberdayaan, untuk itu peran dan keberadaan fasilitator pendamping dari LKM BMT Trans Ngudi Makmur masih diperlukan dan harus tetap dipertahankan sampai masyarakat benar-benar terbiasa dengan proses-proses pemberdayaan yang dijalankan serta telah menjadi budaya bagi masyarakat transmigrasi lokal.